

Dian Eka Rahmawati

Modul Praktikum  
**Komunikasi  
Pemerintahan**

Editor : Sakir, S.IP., M.IP

**Laboratorium Ilmu Pemerintahan**  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

### Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana penjara paling lama 7 Tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedar, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun dan atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)

Modul Praktikum  
**Komunikasi Pemerintahan**

**Dian Eka Rahmawati**



# Modul Praktikum **Komunikasi Pemerintahan**

*Penulis:*

**Dian Eka Rahmawati**

*ISBN:*

**978-623-6992-20-3**

*Editor:*

**Sakir, S.IP., M.IP**

*Penata letak:*

**Tim The Journal Publishing**

*Design Cover:*

**Alvi Novriando**

*Penerbit:*

**The Journal Publishing**

*Redaksi:*

**Jl. Patukan Gamping Tengah RT.004 RW. 015,  
Ambarketawang, Gamping Tengah, Sleman, DIY. Cp. 0823-  
2679-6566**

-----  
**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Dilarang Memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara  
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

## **Kata Pengantar**

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga kami bisa menyelesaikan Modul Praktikum Mata Kuliah Komunikasi Pemerintahan ini.

Ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada Prodi Ilmu Pemerintahan dan Laboratorium Ilmu Pemerintahan UMY yang telah memberikan kesempatan dan dukungan untuk terwujudnya modul ini. Sebagai karya awal, tentunya masih banyak kekurangan dalam modul ini, baik secara substansi maupun penyajian. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap masukan dan saran untuk perbaikan modul ini.

Akhir kata, semoga modul praktikum komunikasi pemerintahan ini bisa memberikan manfaat dan panduan bagi pelaksanaan praktikum. Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 17 Oktober 2020

Dian Eka Rahmawati

Penulis

## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>vi</b>

### **MODUL PRAKTIKUM MATA KULIAH KOMUNIKASI**

<b>PEMERINTAHAN .....</b>	<b>1</b>
1. Pendahuluan .....	1
2. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) .....	10
3. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) .....	11
4. Metode Praktikum .....	12
5. Petunjuk Penggunaan Modul .....	13

### **KEGIATAN BELAJAR 1: PRAKTIKUM ANALISIS**

#### **KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM MEDIA SOSIAL MENGUNAKAN SOFTWARE TOOL NVIVO 12 PLUS..14**

1. Capaian Pembelajaran .....	14
2. Uraian Materi/Pengantar Diskusi .....	14
3. Kegiatan Pratikum.....	17

**Kegiatan Belajar 2: PRAKTIKUM ANALISIS  
KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM MEDIA MASSA  
ONLINE MENGGUNAKAN SOFTWARE TOOL NVIVO 12  
PLUS .....31**

1. Capaian Pembelajaran ..... 31

2. Uraian Materi/Pengantar Diskusi ..... 32

3. Kegiatan Pratikum..... 34

**Daftar Pustaka.....40**







# MODUL PRAKTIKUM MATA KULIAH KOMUNIKASI PEMERINTAHAN

## 1. Pendahuluan

Komunikasi tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.. Secara sederhana komunikasi bisa diartikan sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu. Oleh karena itu, proses komunikasi memiliki setidaknya tiga komponen atau unsur didalamnya yang memungkinkan terjadinya komunikasi, yaitu: komunikator (*source/sender*), pesan (*message/content*), dan komunikan (*destination*). Bila ada hambatan jarak, jumlah komunikan, atau waktu, maka dalam proses komunikasi itu diperlukan sarana atau alat (*media/channel*), supaya pesan yang ingin disampaikan kepada komunikan dapat tersampaikan. Unsur lain adalah umpan balik (*feedback*), yaitu tanggapan atau respon dari komunikan terhadap pesan yang diterimanya. Dari umpan balik inilah, komunikator dapat mengetahui apakah pesan

yang disampaikan telah diterima oleh komunikan seperti yang diinginkan (sama makna) dan bagaimana reaksi komunikan terhadap pesan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa komunikasi yang dimaksudkan disini adalah komunikasi antar manusia yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang disebut *human communication* atau *social communication*. Komunikasi hewan, komunikasi transendental, dan komunikasi fisik tidak termasuk di dalam kajian ini.

Proses komunikasi diharapkan bisa menimbulkan dampak atau efek komunikasi: kognisi, afeksi, dan perilaku. Dampak kognitif berupa dampak berubahnya pikiran si komunikan setelah proses komunikasi berlangsung. Dengan kata lain, tujuan komunikator adalah untuk mengubah pikiran komunikan menjadi tahu tentang sesuatu. Dampak afektif berupa dampak tersentuhnya atau tergerakannya hati si komunikan, sehingga menimbulkan perasaan tertentu. Dampak afektif tidak sekedar si komunikan mengetahui sesuatu, tapi lebih jauh lagi merasakan sesuatu. Dampak perilaku (*behavioral*) berupa dampak berubahnya perilaku, tindakan, atau kegiatan si komunikan setelah dia mengetahui dan merasakan sesuatu. Jadi, dampak perilaku ini merupakan tingkatan tertinggi dari dampak proses komunikasi.

Komunikasi akan berjalan dengan baik apabila komunikator dan komunikan mencapai pengertian atau pemahaman atau pemaknaan yang sama tentang sesuatu hal yang dikomunikasikan. Apabila terdapat dua atau lebih orang melakukan percakapan, maka komunikasi yang komunikatif berlangsung selama mereka yang terlibat dalam percakapan tersebut memiliki kesamaan makna. Kesamaan bahasa yang digunakan belum tentu menimbulkan kesamaan makna. Dengan kata lain, proses komunikasi dikatakan berjalan secara komunikatif bila komunikator dan komunikan sama-sama mengerti bahasa dan memahami makna yang dipercakapkan.

Dalam konteks yang lebih luas, komunikasi terjadi dalam berbagai lingkup kehidupan, salah satunya adalah dalam konteks interaksi pemerintah dan masyarakat. Di sinilah muncul konsep komunikasi pemerintahan, yang bisa diartikan sebagai penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara (Hasan, 2005). Fungsi komunikasi pemerintahan dibedakan menjadi 2: *Pertama, to manage staff*. Fungsi ini merupakan fungsi komunikasi internal organisasi pemerintahan baik dalam bentuk *downward communication* maupun *upward communication*. Fungsi ini merujuk pada konsep komunikasi organisasional, yang didefinisikan sebagai komunikasi yang terjadi dalam konteks

hubungan dan interaksi dalam sebuah organisasi. Organisasi adalah kumpulan (atau sistem) individu yang secara bersama-sama, melalui suatu hirarkhi jabatan dan pembagian kerja, berusaha mencapai suatu tujuan tertentu. *Kedua, to manage people.* Fungsi ini merupakan fungsi komunikasi pemerintahan yang mengarah pada komunikasi eksternal kepada publik / stakeholder di luar organisasi pemerintahan.

Lalu siapakah yang dimaksud dengan pemerintah? Dalam perspektif teoritis Max Boli Sabon dalam bukunya Ilmu Negara (2019) yang menjelaskan pendapat Ernst Utrecht yang menyebutkan ada 3 pengertian pemerintah: *Pertama*, pemerintah dalam arti luas meliputi lembaga eksekutif, lembaga legislative, dan lembaga yudikatif. Termasuk pula semua badan yang menyelenggarakan kesejahteraan umum. *Kedua*, pemerintah dalam arti gabungan badan kenegaraan tertinggi atau satu badan kenegaraan tertinggi yang memerintah dalam suatu negara. *Ketiga*, pemerintah dalam arti lembaga eksekutif yang terdiri dari kepala eksekutif beserta kabinetnya.

Bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan UU no.23 tahun 2014 disebutkan bahwa pemerintah dibedakan menjadi 2: pemerintah pusat dan pemerintah daerah. *Pemerintah Pusat* adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik

Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Pemerintah Daerah* adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. *Pemerintahan Daerah* adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kementerian Negara diatur dalam UU nomor 39 Tahun 2008 dan di dalam pasal 15 disebutkan bahwa jumlah maksimal kementerian yang bisa dibentuk adalah 34 kementerian. Selain itu, Indonesia juga memiliki Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), disamping adanya kementerian negara. Lembaga tersebut, sebelumnya dikenal sebagai Lembaga Pemerintah Non-Departemen. LPNK merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden

melalui menteri atau pejabat setingkat menteri lainnya (www.kompas.com).

LPNK diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non-Departemen. Berikut daftar Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian di Indonesia:

1. Arsip Nasional Republik Indonesia, di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Badan Informasi Geospasial (BIG).
3. Badan Intelijen Negara (BIN).
4. Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
5. Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional (BKKBN), di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
7. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

9. Badan Narkotika Nasional (BNN).
10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP).
11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
12. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
13. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di bawah koordinasi Menteri Kesehatan.
14. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), di bawah koordinasi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
15. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
16. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
18. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
19. Badan Pertanahan Nasional (BPN), di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri.
20. Badan Pusat Statistik (BPS), di bawah koordinasi Menteri Bidang Perekonomian.
21. Badan SAR Nasional (BASARNAS) Badan Standardisasi Nasional (BSN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.

22. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
23. Badan Urusan Logistik (BULOG), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
24. Lembaga Administrasi Negara (LAN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
25. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
26. Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS).
27. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
28. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
29. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
30. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS), di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Mata kuliah komunikasi pemerintahan merupakan mata kuliah pilihan bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMY di semester 5. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan



pemahaman teoritik dan kemampuan menganalisa fungsi internal dan eksternal dari komunikasi pemerintahan dengan membahas: konsep-konsep dasar komunikasi, konsep-konsep dasar komunikasi pemerintahan, komunikasi organisasional, peran public relation pemerintah dalam komunikasi pemerintahan, kepemimpinan dalam komunikasi pemerintahan, serta aplikasi teknologi dan komunikasi dalam komunikasi pemerintahan.

Proses komunikasi pemerintahan saat ini kian berkembang seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan juga kepala daerah, secara signifikan telah mengadopsi berbagai platform media sosial untuk menyampaikan berbagai informasi dan mendapatkan feedback dari masyarakat serta *stakeholders* lainnya. Selain itu, pergeseran bentuk media massa cetak ke media massa online, juga perlu mendapatkan perhatian dalam proses komunikasi pemerintahan. Media massa bisa dikatakan merupakan salah satu *stakeholder* penting bagi pemerintah dalam proses komunikasi pemerintahan.

Modul praktikum ini akan mempelajari dan menganalisa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia, baik secara kelembagaan ataupun pejabat publik yang

merepresentasikan kedudukannya dalam pemerintahan, dengan menggunakan software analisis data NVivo 12 plus. Fokus praktikum pada modul ini adalah komunikasi pemerintahan yang menggunakan media sosial dan media massa online yang kredibel.

## **2. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU)**

Setelah mempelajari modul dan melakukan praktikum, mahasiswa diharapkan mencapai Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) dan Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) sesuai yang tertuang dalam Rancangan Pembelajaran Semester (RPS). TPU merupakan kompetensi yang menjadi target pembelajaran, yang telah disusun dan ditetapkan di dalam Kurikulum Prodi IP UMY mengacu pada KKNI.

TPU terdiri dari kompetensi berupa hard skills dan soft skills sebagai berikut:

### **Hard Skills:**

- 1) Menguasai konsep teoritis partisipasi masyarakat, civil society, kelembagaan masyarakat dan pembangunan masyarakat dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.
- 2) Menguasai proses politik dengan cara yang berkelanjutan (sustainability).

**Soft skills:**

- 1) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- 2) Menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik.
- 3) Menginternalisasi nilai, norma, etika politik dan pemerintahan.
- 4) Kreatif, inovatif, teliti, cermat dalam menyelesaikan masalah.

**3. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)**

Setelah mempelajari modul dan melakukan praktikum, mahasiswa diharapkan mencapai Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) dan Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) sesuai yang tertuang dalam Rancangan Pembelajaran Semester (RPS). TPK merupakan kompetensi khusus yang menjadi target pembelajaran khusus mata kuliah Komunikasi Pemerintahan, yang telah disusun dan ditetapkan di dalam Kurikulum Prodi IP UMY mengacu pada KKNI.

TKU terdiri dari kompetensi berupa hard skills dan soft skills sebagai berikut:

**Hard Skills:**

- 1) Menguasai konsep teoritis komunikasi pemerintahan.

- 2) Menguasai proses komunikasi pemerintahan dengan cara yang berkelanjutan (sustainability).

**Soft skills:**

- 1) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain dalam aspek komunikasi pemerintahan.
- 2) Menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik dalam melakukan penelitian dan publikasi tentang komunikasi pemerintahan.
- 3) Menginternalisasi nilai, norma, etika politik dan pemerintahan dalam komunikasi pemerintahan.
- 4) Kreatif, inovatif, teliti, cermat dalam menyelesaikan masalah komunikasi pemerintahan.

#### **4. Metode Praktikum**

Praktikum dilaksanakan dengan penjelasan materi, pemutaran video tutorial, tanya jawab, praktik, dan pendampingan menggunakan software analisis data NVivo 12 plus. Peralatan tutorial yang diperlukan adalah white board, spidol, penghapus, LCD, laptop, software NVivo 12 plus.

## **5. Petunjuk Penggunaan Modul**

Berikut beberapa petunjuk singkat untuk mempelajari modul praktikum ini:

- 1) Bacalah dengan cermat modul ini.
- 2) Pelajari dengan cermat langkah-langkah praktikum menggunakan software tool NVivo12 plus sebagai sebagai alat pengolah dan analisa data.
- 3) Pelajari dan ikuti dengan cermat tutorial praktikum online yang disediakan dalam bentuk video dan bisa diakses melalui link yang akan diberikan.
- 4) Mantapkan pemahaman Anda dengan mengerjakan latihan dalam modul dan melalui kegiatan diskusi dengan sesama mahasiswa dan tutor. Jangan dilewatkan untuk mencoba menjawab soal-soal yang disediakan pada setiap akhir kegiatan belajar. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah Anda sudah memahami dengan benar kandungan modul ini.
- 5) Perluas pengetahuan dan keterampilan Anda dengan mempelajari sumber-sumber lain yang relevan.



# **KEGIATAN BELAJAR 1: PRAKTIKUM ANALISIS KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM MEDIA SOSIAL MENGGUNAKAN SOFTWARE TOOL NVIVO 12 PLUS**

## **1. Capaian Pembelajaran**

Capaian pembelajaran yang diharapkan dari praktikum analisis komunikasi pemerintahan dalam media sosial dengan menggunakan software tool NVivo12 plus sebagai sebagai alat pengolah dan analisa data adalah: mahasiswa dapat menganalisa komunikasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat publik dalam akun media sosial mereka dengan menggunakan software tool NVivo12 plus sebagai sebagai alat pengolah dan analisa data. Selanjutnya mahasiswa dapat menulis paper dengan menggunakan data tersebut.

## **2. Uraian Materi/Pengantar Diskusi**

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting di kehidupan masyarakat, komunikasi bisa berkaitan dengan

satu orang dengan orang lainnya, suatu kelompok dengan individu, warga negara dengan pemerintah (Waluyo, 2019). Komunikasi yang dilakukan antara warga negara atau masyarakat dengan pemerintah, keduanya dapat menjadi sebagai komunikator dimana masyarakat akan menjadi komunikator apabila masyarakat sebagai penggagas ide dan pemerintah sebagai komunikator apabila pemerintah sebagai penyampai informasi (Alfiyani, 2018). Karena komunikasi pemerintahan sebagai penyampai informasi sebuah program, kebijakan, maupun ide-ide dari pemerintahan untuk menjadi visi dan misi kepada masyarakat (Anggreani et al., 2020)

Pada saat ini, Pemerintah telah mengadopsi media sosial sebagai media komunikasi. Dimana berbagai pemerintah baik pusat maupun daerah telah memiliki akun media sosial seperti Instagram dan twitter. Hal ini dikarenakan, masyarakat sering menggunakan dua media sosial tersebut. Sehingga hal tersebut akan menjadikan komunikasi pemerintah melalui media sosial efektif. Akan tetapi, dengan penggunaan media sosial sebagai platform komunikasi pemerintah nantinya juga dapat menciptakan berbagai perspektif masyarakat baik positif maupun negative.

Penggunaan media sosial sebagai platform komunikasi pemerintahan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan pola komunikasi kepada masyarakat (Belkahl

Driss et al., 2019). Karena pada saat ini media sosial telah banyak dimanfaatkan oleh organisasi pemerintahan bahkan non pemerintahan sebagai alat untuk menyerap aspirasi dari masyarakat (Kahne & Bowyer, 2018). Dimana pada saat ini, media sosial telah banyak digunakan oleh masyarakat untuk mencari dan mendapatkan informasi (Adinugroho et al., 2019). Pada era 4.0, media sosial mampu menjadi sarana yang ideal dan menjadi basis informasi untuk mengetahui opini publik (Barniat, 2019). Sehingga komunikasi pemerintah melalui media sosial menjadi efektif dilakukan karena melalui media sosial pemerintah mampu membangun hubungan dengan masyarakat (Baum & Potter, 2019).

Pemerintah menjadikan platform media sosial sebagai tempat untuk mengkomunikasikan atas pencapaian yang dilakukan oleh pemerintah atau menciptakan ruang untuk diskusi dengan masyarakat (Belkahla Driss et al., 2019). Karena media sosial dianggap pemerintah sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan data maupun opini dari masyarakat (Boudjelida, Mellouli, & Lee, 2016). Sehingga penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi pemerintah mampu mengurangi kesenjangan dalam pembuatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini seperti konsep government to citizen (G2C), dimana konsep ini menjadikan sosial media sebagai pendukung untuk



membentuk hubungan antara masyarakat dengan pemerintah (Pardo, Nam, & Burke, 2012).

Melalui mata kuliah praktikum Komunikasi Pemerintahan, kita mencoba untuk menganalisis komunikasi pemerintahan melalui media sosial dengan menggunakan software tool yaitu NVivo12 plus, khususnya platform twitter. NVivo 12 plus merupakan salah satu software dalam membantu mengolah data penelitian maupun dalam menganalisis data. Dimana untuk analisis komunikasi pemerintahan melalui media sosial menggunakan tool yang ada di Nvivo yaitu NCapture.

### **3. Kegiatan Pratikum**

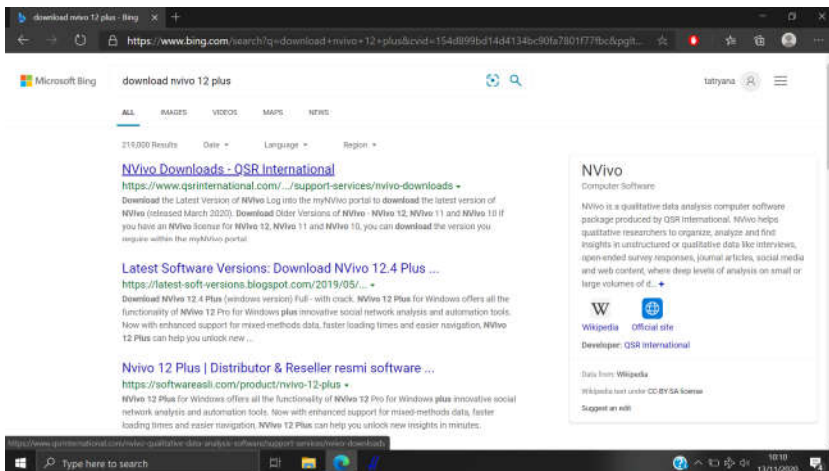
Sebelum kita melakukan praktikum “Analisis Komunikasi Pemerintahan dengan Menggunakan Perangkat NVivo 12 Plus”, maka sebagai langkah awal kita harus menginstall Aplikasi NVivo 12 Plus. Ada 2 model, yaitu Trial dan Berbayar. Untuk kegiatan praktikum kali ini kita akan menggunakan model Trial. Nantinya, apabila teman-teman mahasiswa membutuhkan Aplikasi NVivo dalam jangka waktu lebih dari 2 minggu untuk berbagai kebutuhan penulisan paper ataupun penelitian skripsi, maka bisa menginstall model yang berbayar.

Berikut ini, akan dijelaskan bagaimana menginstall NVivo 12 Plus sebelum masuk ke tahap penggunaan software

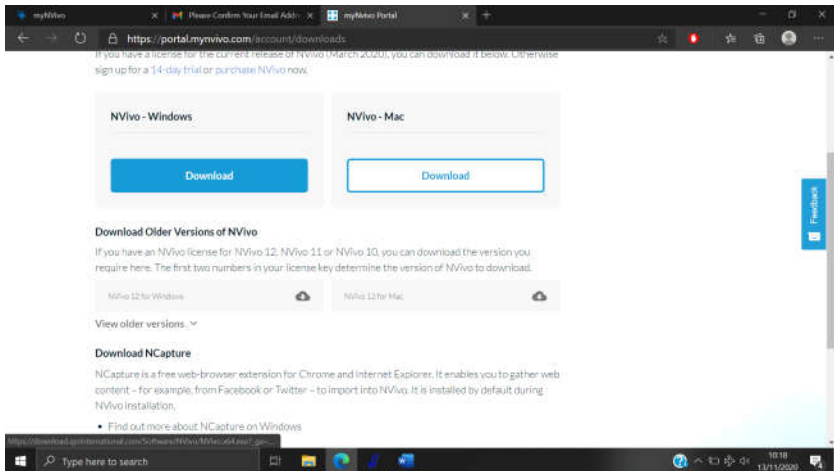
analisis data ini. NVivo merupakan aplikasi yang dapat menjawab kebutuhan para peneliti kualitatif dan metode campuran (kualitatif dan kuantitatif) dalam mengelola dan menganalisis data dengan efektif dan efisien, baik untuk penelitian individu maupun penelitian tim. NVivo juga dapat memperkuat validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif serta sangat powerful untuk melakukan analisis data digital dan nondigital.

## LANGKAH-LANGKAH MENGINSTALL NVIVO 12 PLUS:

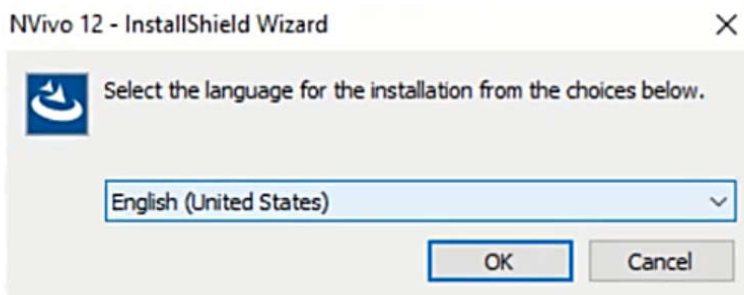
- 1) Search di google “Download NVivo 12 Plus”. Klik pada NVivo download dan terdapat beberapa menu yang ditampilkan pilih support & service dan pilih NVivo download



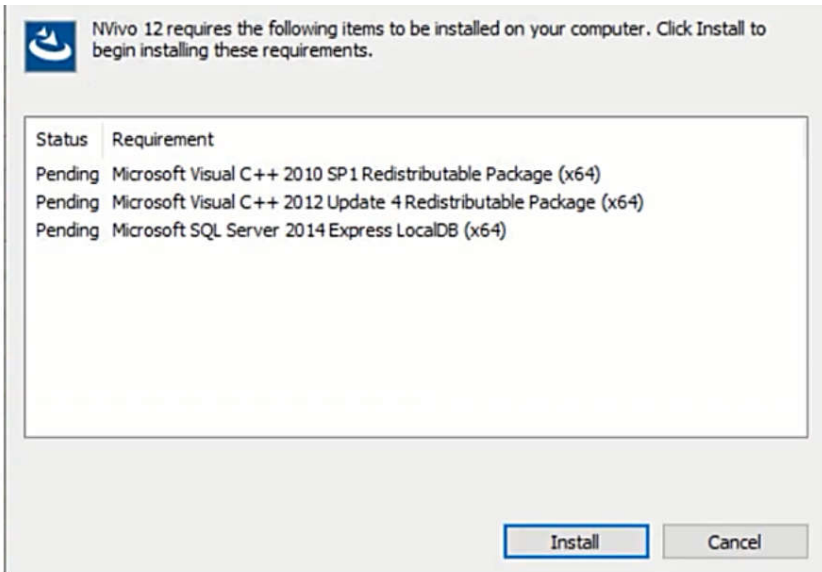
- 2) Pilih salah satu sesuai dengan perangkat. Pada bagian ini ada dua penawaran, dimana NVivo bagi pengguna windows dan bagi pengguna mac. Silahkan pilih sesuai dengan perangkat/PC.



- 3) Klik 2 kali pada aplikasi NVivo. Kemudian akan muncul jendela pilihan Bahasa seperti dibawah. Pilih Bahasa lalu klik OK.



- 4) Selanjutnya akan muncul jendela untuk menginstall NVivo 12 lalu klik Install.



- 5) Setelah selesai proses menginstalasi akan muncul tampilan aktivasi lisensi NVivo 12. Kemudian wajib diisi yang berbintang merah.

NVivo Setup ? X

## License Activation

You must activate your license before you can use NVivo. Please enter your details below and click 'Activate'.

This form must be completed in Western character sets.

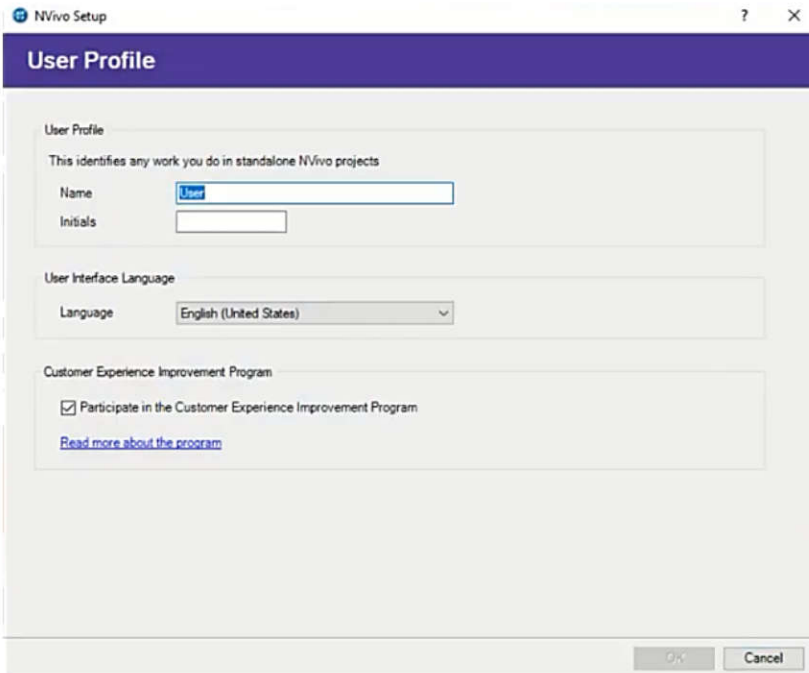
- First Name
- Last Name
- Email Address
- Phone
- Fax
- Sector
- Industry
- Job Role

License Key

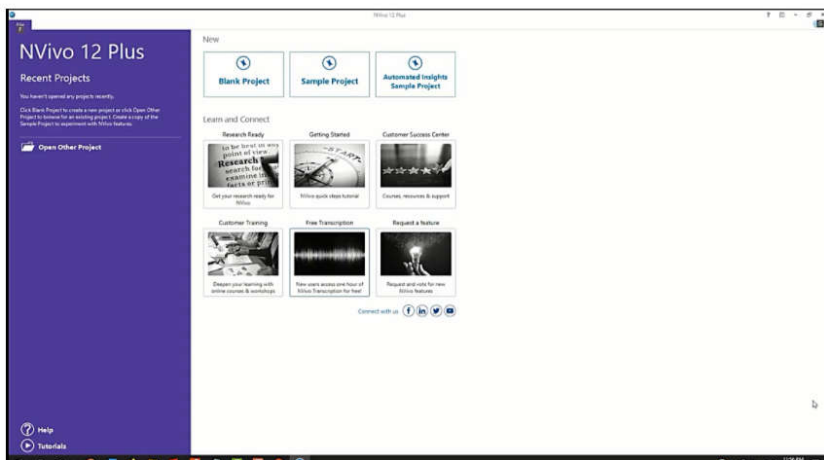
- Job Title
- Department
- Organization
- City
- Country
- State
- How did you hear about NVivo?

• indicates a required field

6) Selanjutnya diisi profil pengguna/user profile seperti berikut



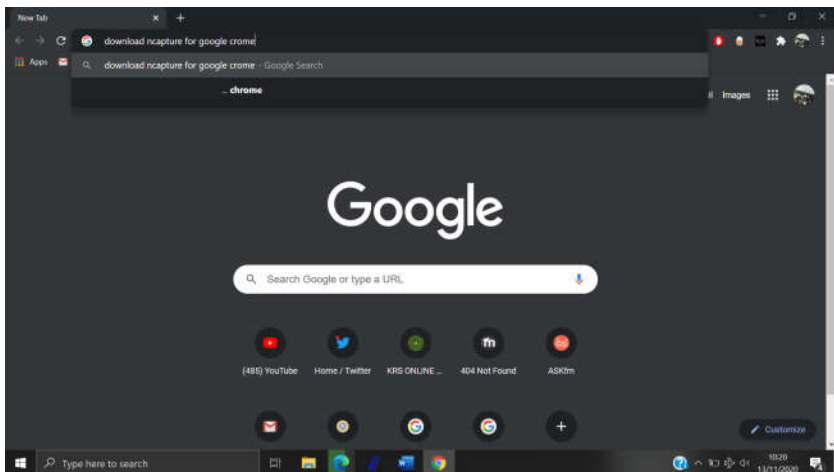
7) NVivo sudah dapat digunakan



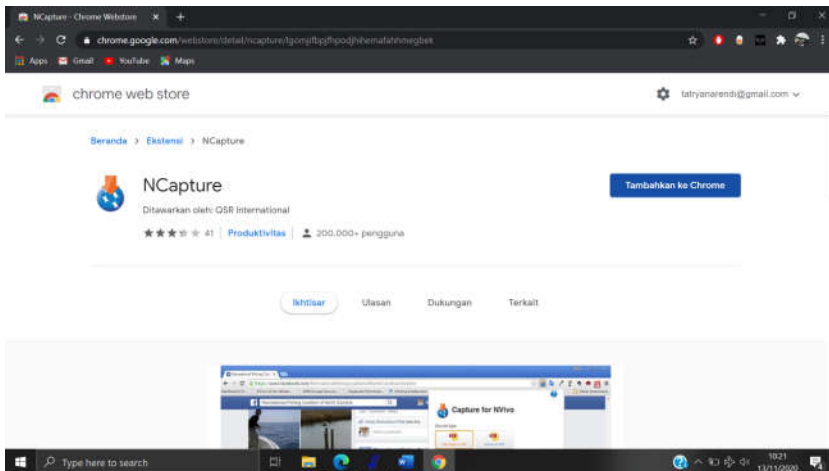
## LANGKAH-LANGKAH MENDOWLOAD NCAPTURE:

Untuk dapat menggunakan NVivo dalam menganalisis media massa maupun media sosial, maka perlu adanya perangkat tambahan yaitu Ncapture. NCapture ini berguna untuk menangkap informasi atau data sekunder yang berasal dari media sosial maupun media massa online. Berikut langkah-langkahnya:

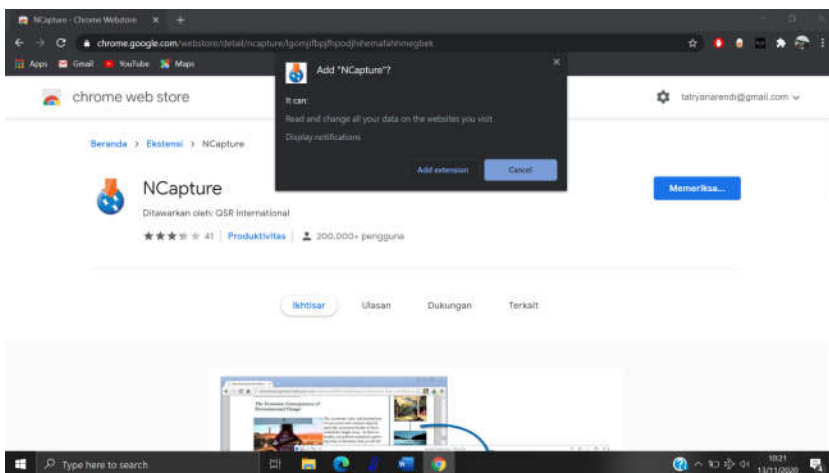
- 1) Search di kolom search google “download NCapture for google chrome”.



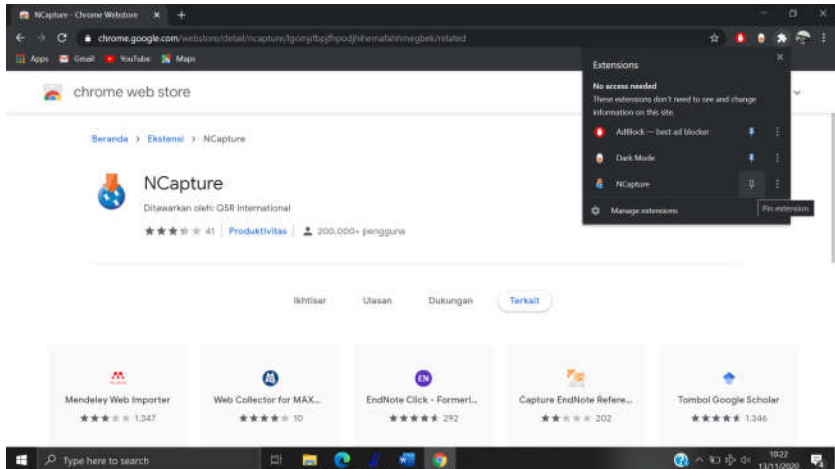
- 2) Selanjutnya tampilan akan seperti berikut. Dan pilih tambahkan ke chrome.



- 3) Setelah ditambahkan, maka akan ada notifikasi untuk menawarkan ditambahkan pada extension. Selanjutnya klik add extension. Dan apabila mengingkan Ncapture berada di tampilan maka klik pin.







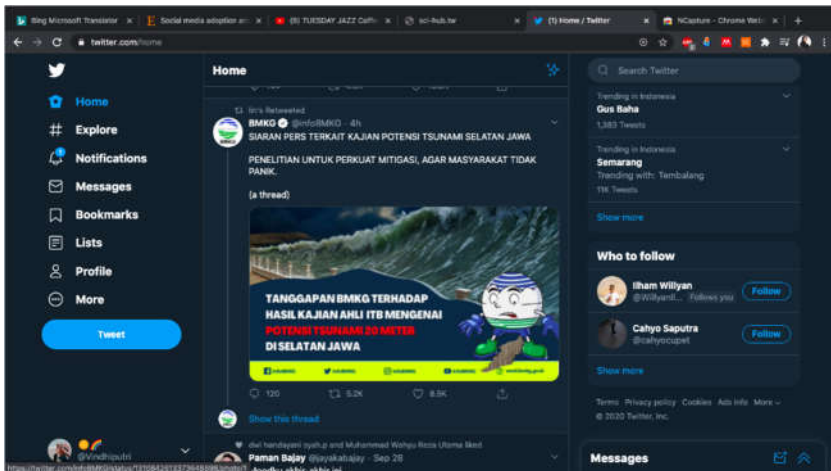
4) NVIVO dan N\_CAPTURE siap digunakan.

## **Langkah-langkah menganalisis komunikasi pemerintah melalui media sosial dengan aplikasi NVivo12 plus**

Apabila Aplikasi NVivo 12 Plus sudah siap digunakan, selanjutnya kita akan masuk pada materi “Langkah-langkah menganalisis komunikasi pemerintah melalui media sosial dengan aplikasi NVivo12 plus”. Ikutilah panduan Langkah-langkah di bawah ini:

### **1) Buka akun twitter**

Bagian ini, merupakan langkah awal untuk mencari data dari akun yang menjadi obyek penelitian. Karena twitter salah satu platform komunikasi melalui media sosial.



## 2) Search twitter user yang akan di analisis

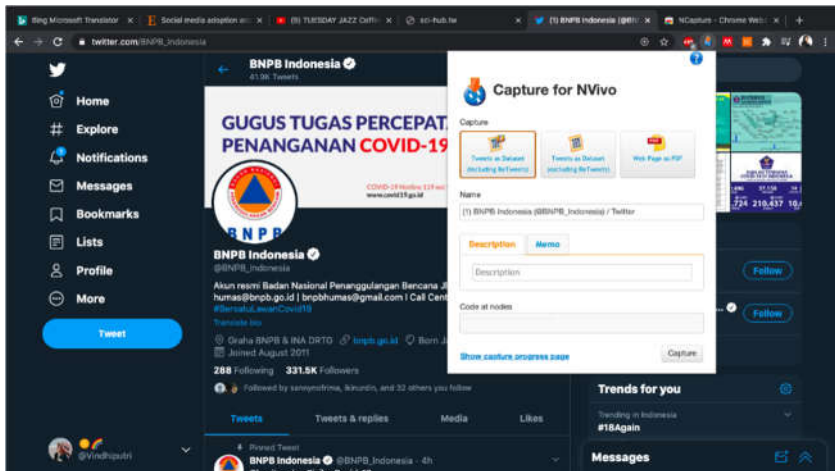
Langkah ini menjadi bagian dalam mencari akun twitter dari obyek penelitian yang telah ditentukan sebelumnya



## 3) Klik NCapture dan save

Pada bagian ini, merupakan langkah awal dalam pengumpulan data, dimana akun yang menjadi obyek

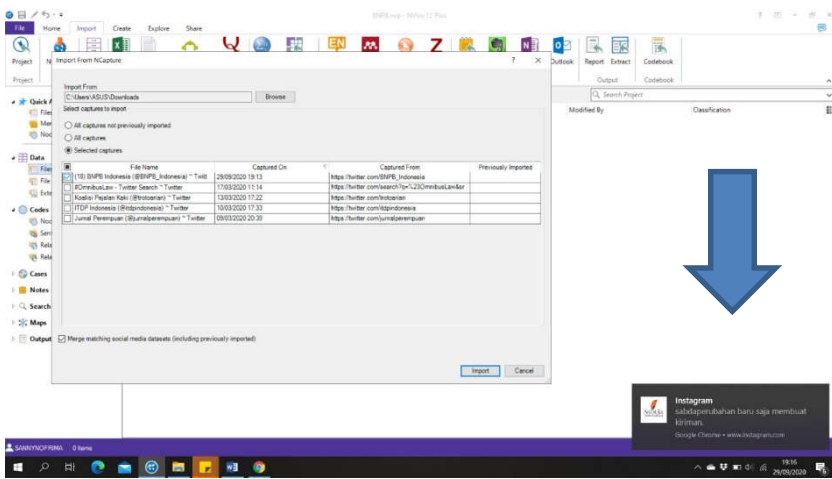
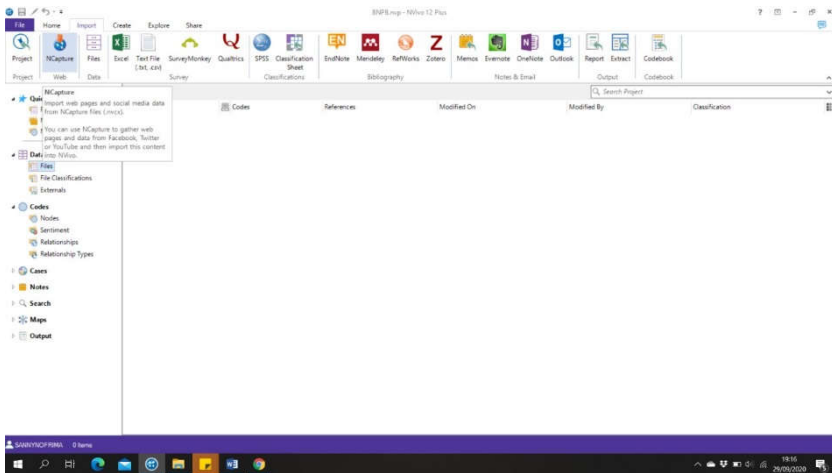
penelitian dilakukan NCapture / Screenshoot menggunakan tool NCapture yang merupakan tool NVivo.



#### 4) Buka aplikasi NVivo 12 Plus, Klik impor, lalu pilih Ncapture

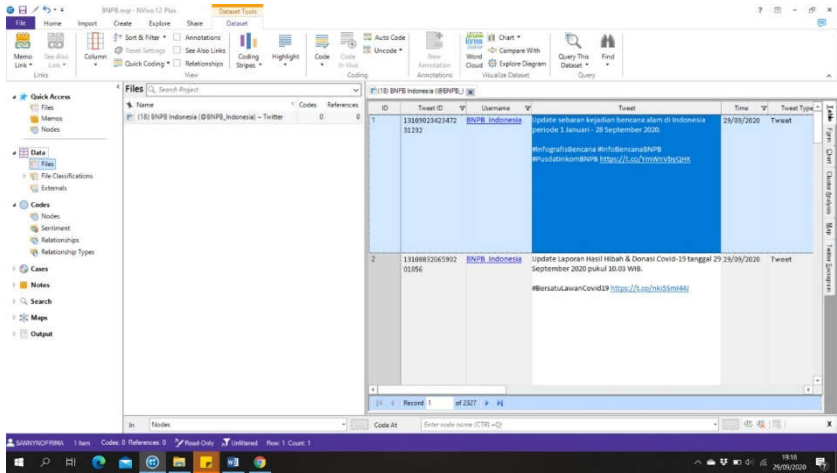
Bagian ini, hasil NCapture sebelumnya di impor untuk diolah dengan aplikasi NVivo. Dimana langkahnya seperti berikut :

Open Nvivo → Klik impor → pilih Ncapture → pilih file yang tadi telah di Ncapture → Impor

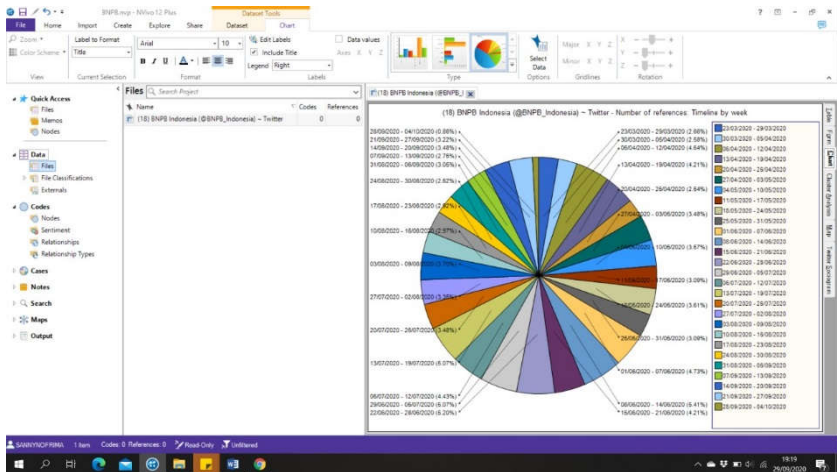


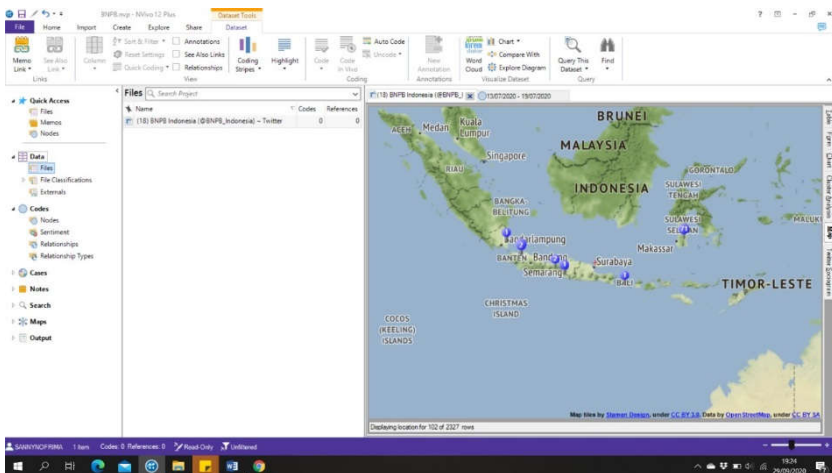
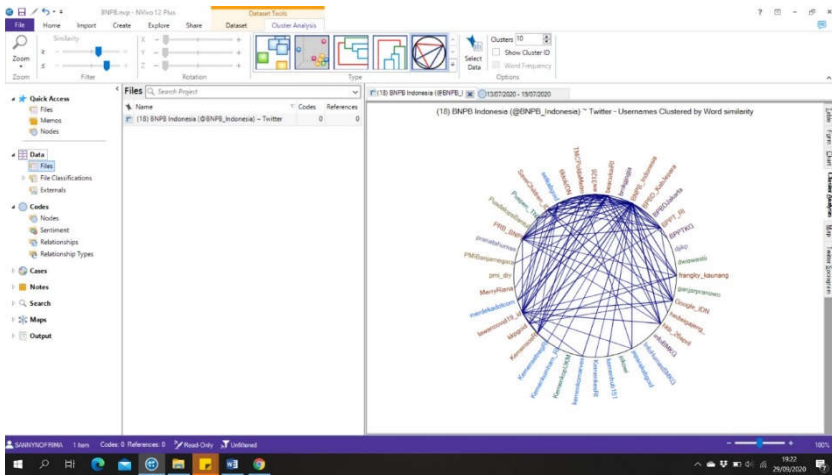
## 5) Klik 2 kali pada file yang telah di impor

Bagian ini yaitu merupakan langkah untuk menganalisis data yang didapatkan dari NCapture akun twitter, dimana disini ada beberapa pilihan yaitu cluster analysis, word similarity, map cluster, windows photo viewer dan twitter photo viewer.



## 6) Melihat hasil analisis media sosial twitter







# **KEGIATAN BELAJAR 2: PRAKTIKUM ANALISIS KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM MEDIA MASSA ONLINE MENGUNAKAN SOFTWARE TOOL NVIVO 12 PLUS**

## **1. Capaian Pembelajaran**

Capaian pembelajaran yang diharapkan dari praktikum analisis komunikasi pemerintahan dalam media massa online dengan menggunakan software tool NVivo12 plus sebagai sebagai alat pengolah dan analisa data adalah: mahasiswa dapat menganalisa komunikasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat publik yang diberitakan dalam media massa online yang kredibel, dengan menggunakan software tool NVivo12 plus sebagai sebagai alat pengolah dan analisa data. Selanjutnya mahasiswa dapat menulis paper dengan menggunakan data tersebut. Lebih jauh, dapat digunakan sebagai salah satu alternatif skripsi.

## 2. Uraian Materi/Pengantar Diskusi

Pada saat ini, penelitian dengan menggunakan sumber primer dan sekunder terus mengalami peningkatan. Dimana data dikumpulkan melalui media internet, dan diolah oleh peneliti dengan menggunakan berbagai software analisis data. Salah satu sumber data penelitian dapat berasal dari berita online. Karena melalui media berita online, berbagai berita ataupun percakapan dari narasumber ter-record dalam suatu berita online dan dengan mudah masyarakat langsung mengakses berita yang ingin dicari pada saat itu.

Hal ini didukung perubahan pada era digital yang semakin pesat, dimana hal ini mengubah sifat dasar komunikasi yang tadinya komunikasi hanya bersifat verbal akan tetapi pada saat ini komunikasi pemerintahan dapat dilakukan secara non verbal dengan melalui media massa atau media berita online. Karena media online memberikan berbagai pilihan editorial content, baik yang disediakan oleh media induk. Informasi yang sedang terjadi di lapangan dapat disampaikan secara cepat melalui media massa online, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan cepat terkait kebijakan maupun isu pemerintahan yang sedang terjadi pada saat itu.

Dengan kehadiran media berita online, maka menambah *platform* komunikasi. Dimana melalui media berita online juga adanya pesan yang disampaikan maupun



informasi baik dari pemerintah maupun non pemerintah dan masyarakatlah sebagai penerima informasi tersebut. Oleh karena pada mata kuliah praktikum Komunikasi Pemerintahan, akan mencoba menganalisis komunikasi yang ada melalui media berita online dengan menggunakan aplikasi NVivo 12 Plus. Beberapa portal berita online yang memiliki signifikansi dalam menyalurkan berita dan pernah mendapatkan penghargaan sebagai berikut :

Nasional	Internasional
Detik.com	Bbc.com
Kompas.com	Foxnews.com
Republika.co.id	Globo.com
Okezone.com	News.sky.com
Antarane.ws.com	Cnbc.com
Tempo.co	Cnn.com
Tribunnews.com	Aljazeera.com

Daftar media berita online diatas merupakan beberapa portal berita online baik nasional maupun internasional. Selain nantinya akan membahas situs berita online sesuai dengan topik penelitian, mahasiswa perlu menyiapkan beberapa situs berita sebagai bahan analisis data menggunakan NVivo 12 Plus. Semakin banyak situs berita yang akan dianalisis, maka semakin tinggi intensitas hubungan

antara berita yang satu dengan yang lain serta investigasi kasusnya.

### **3. Kegiatan Pratikum**

Langkah-langkah penggunaan NVivo melalui berita online :

#### **1) Menentukan topik/studi kasus penelitian**

Bagian ini sangat penting untuk memulai penelitian, peneliti harus dari awal telah menentukan topik atau studi kasus yang ingin diteliti. Selain itu, peneliti juga harus menyiapkan variabel/indicator apa yang ingin diteliti.

**Contoh:** “Komunikasi Pemerintah Pusat terhadap penanganan COVID 19”

#### **2) Mencari topik/studi kasus penelitian di berita online**

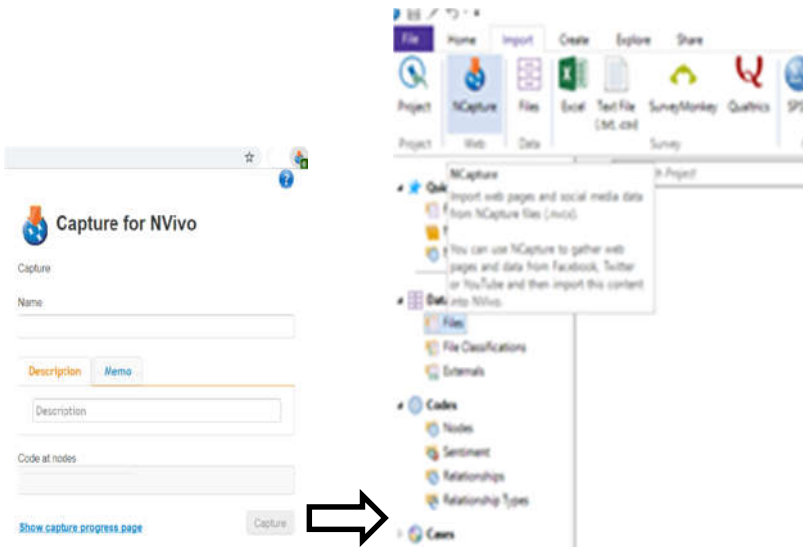
Bagian ini adalah langkah awal untuk mencari topik atau studi kasus di website berita online dengan kata kunci studi kasus. Contoh: “Covid-19 Indonesia” “Ancaman Covid Indonesia” “Kekuatan Covid-19 Indonesia”, “Kelemahan Covid-19 Indonesia” “Peluang Covid-19 Indonesia” dan lain-lain. Selanjutnya, ketika

peneliti telah menemukan berita online yang sesuai dengan topik kemudian dapat membuka berita tersebut.

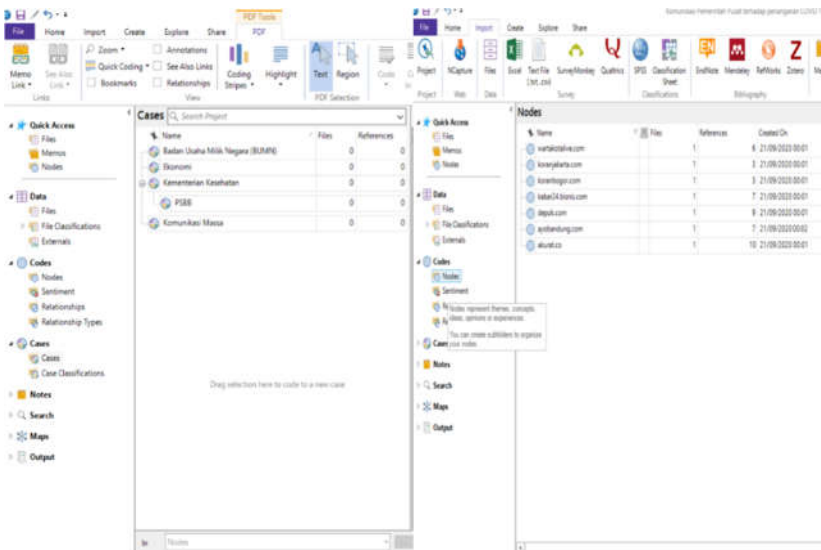
**3) Melakukan NCapture pada situs berita online yang dituju**

Setelah masuk ke situs berita online, maka selanjutnya diperlukan NCapture, NCapture merupakan bagian luar dari NVivo yang telah tersambung dengan google chrome yang berfungsi sebagai penangkap situs berita. Dengan kata lain, NCapture sebagai tahapan untuk menyimpan situs berita online yang kemudian akan di masukan ke dalam NVivo.

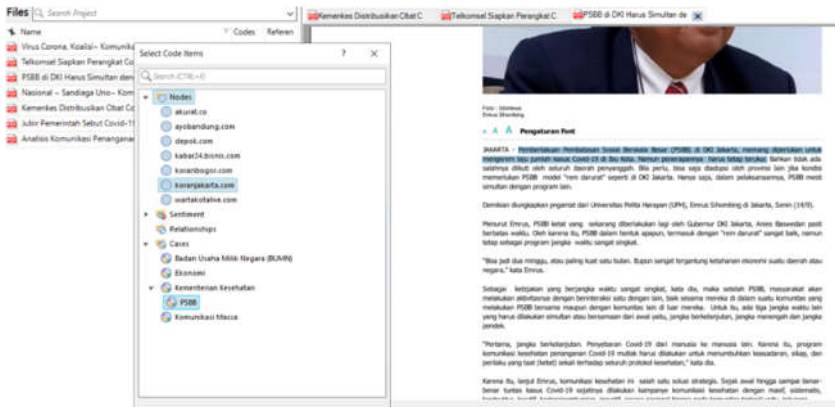
**4) Buka aplikasi NVivo dan klik impor untuk memasukkan data yang telah didapatkan dari sumber berita online dengan menggunakan Ncapture**



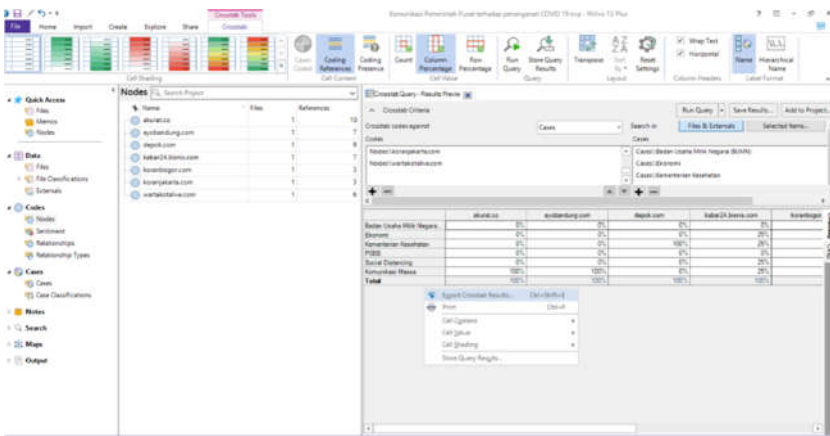
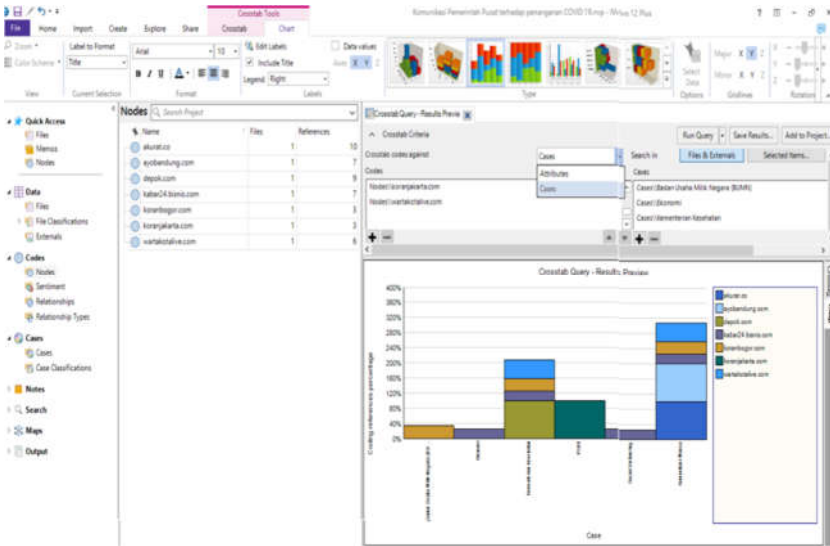
**5) Menentukan Nodes (Stakeholder, Berita, Nama) dan Cases sesuai indikator yang menjadi tolak ukur penelitian dengan menggunakan Nvivo 12 Plus.**

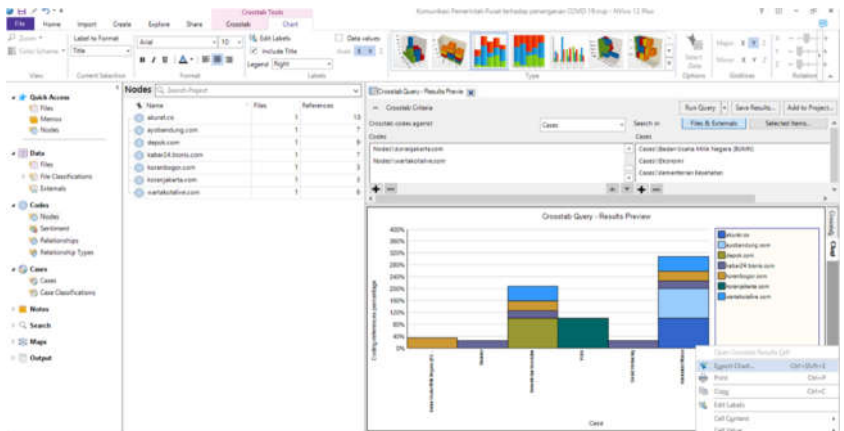


6) Setelah menentukan Nodes dan Cases, melakukan coding melalui berita yang telah di tentukan sebagai tema yang selaras dengan topik penelitian.



a. Setelah melakukan Coding dengan beberapa berita yang telah ditentukan peneliti, selanjutnya peneliti akan mencari hasil analisis penelitian dengan menggunakan fitur Crosstab dalam bentuk angka persentase (Count, Column Percentage, Row Percentage).





## Daftar Pustaka

- Adinugroho, B., Prisanto, G. F., Irwansyah, I., & Ernungtyas, N. F. (2019). Media Sosial dan Internet Dalam Keterlibatan Informasi Politik dan Pemilihan Umum. *Jurnal Representamen*, 5(02), 80–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/representamen.v5i02.2943>
- Alfiyani, N. (2018). Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Politik. *Potret Pemikiran*, 22(1). <https://doi.org/10.30984/pp.v22i1.762>
- Anggreani, M. D., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2020). RUANG PUBLIK VIRTUAL SEBAGAI PINTU KOMUNIKASI GOVERNMENT TO CITIZEN (Studi Kasus: Perbandingan Media Sosial Pemerintah Kota Yogyakarta dan Surabaya). *Jurnal MODERAT*, 6(1), 203–220. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3165/2919>
- Barniat, Z. (2019). POLITICAL COMMUNICATIONS IN THE SOCIAL MEDIA OF INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0. *Konsensus*, 1(1), 59–67.
- Belkahla Driss, O., Mellouli, S., & Trabelsi, Z. (2019). From citizens to government policy-makers: Social media data analysis. *Government Information Quarterly*, 36(3), 560–570. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.05.002>
- Kahne, J., & Bowyer, B. (2018). The Political Significance of Social Media Activity and Social Networks. *Political Communication*, 35(3), 470–493. <https://doi.org/10.1080/10584609.2018.1426662>
- Waluyo, D. (2019). Pemahaman Komunikasi Politik Pada Era Digital. *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi*, 2(2), 160–167. <https://doi.org/10.17933/diakom.v2i2.63>



